



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 98 TAHUN 2024
TENTANG
PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi perlu memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) lampiran Keputusan ini pada jabatan baru sebagaimana dalam lajur 6 (enam) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
 6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI.**

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang namanya sebagaimana tercantum pada lajur 2 (dua), diangkat ke dalam jabatan baru sebagaimana tercantum pada lajur 6 (enam), terhitung mulai tanggal sebagaimana pada lajur 9 (sembilan) pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;



5. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I;
7. Kepala Bagian Keuangan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2024

SEKRETARIS JENDERAL,
HERU SETIAWAN



Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah
Konstitusi

Nomor : 98 TAHUN 2024

Tanggal : 20 Februari 2024

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN		UNIT KERJA	KELAS JABATAN	TMT	KET.
				LAMA	BARU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Renando Piany Fazardo, S.E	19880618 201801 1 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analisis Aplikasi Dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Biro Perencanaan dan Keuangan	7	20 Februari 2024	
2.	Achmad Junaedi, S.H.	19850424 200604 1 004	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengelola BMN	Analisis Peraturan Perundang- Undangan Dan Rancangan Peraturan Perundang- Undangan	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	7	20 Februari 2024	
3.	Annisa Lestari, S.I.Kom., M.Si.	19851216 200901 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Tata Usaha	Analisis Tata Usaha	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	7	20 Februari 2024	
4.	Lambang Tri Sulistiyo, A.Md.	19770901 200604 1 001	Penata (III/c)	Penyusun Program Kelembagaan dan Kerjasama	Pengadministrasi Registrasi Perkara	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	7	20 Februari 2024	Pada Panitera Muda I
5.	Agusweka Poltak Siregar, S.H.	19850815 201402 1 001	Penata (III/c)	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pengadministrasi Registrasi Perkara	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	7	20 Februari 2024	Pada Panitera Muda I
6.	Budi Asmoro, S.Sos.	19710710 199403 1 003	Penata (III/c)	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Juru Panggil	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	7	20 Februari 2024	Pada Panitera Muda II
7.	Ricky Nafri Habibanda, S.E.	19730823 200604 1 003	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Keamanan	Juru Panggil	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	7	20 Februari 2024	Pada Panitera Muda II
8.	Denny Feishal, S.Sos.	19780228 200604 1 005	Penata Tk. I (III/d)	Petugas Protokol	Pengelola Persidangan	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	7	20 Februari 2024	Pada Panitera Muda II
9.	Widi Atmoko, S.H., M.H.	19781016 200604 1 003	Pembina (IV/a)	Analisis Kerja Sama	Pengelola Persidangan	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	7	20 Februari 2024	Pada Panitera Muda II



NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN		UNIT KERJA	KELAS JABATAN	TMT	KET.
				LAMA	BARU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Andhini Sayu Fauzia, S.Ikom.	19860128 200712 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Pengelola Media Center dan Kemitraan Media	Pengelola Persidangan	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	7	20 Februari 2024	Pada Panitera Muda II
11.	Lutfi Yudhistira, A.Md.	19830320 200604 1 006	Penata (III/c)	Petugas Protokol	Analisis Kerjasama Luar Negeri	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	7	20 Februari 2024	
12.	Ananda Pria, A.Md.	19700429 200701 1 002	Penata (III/c)	Pengelola Tata Naskah	Analisis Keamanan	Biro Umum	7	20 Februari 2024	
13.	Ade Kurniawan, S.A.P.	19730630 200604 1 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Petugas Protokol	Analisis Keamanan	Biro Umum	7	20 Februari 2024	
14.	Syarief Hidayatullah, S.E.	19780414 200604 1 005	Penata Tk. I (III/d)	Petugas Protokol	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Biro Umum	7	20 Februari 2024	
15.	Khurin'in Kurnia Putri, S.E.	19940411 201801 2 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Penyusun Laporan Hasil Diklat	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	7	20 Februari 2024	
16.	Muhlis Nova	19691117 199103 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	Analisis Tata Usaha	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	7	20 Februari 2024	
17.	Suhardi, S.Pd.	19951023 201801 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penyusun Kurikulum, Modul Dan Bahan Ajar	Analisis Tata Usaha	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	7	20 Februari 2024	

SEKRETARIS JENDERAL,
HERU SETIAWAN

